

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006). Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh aspek kemiskinan, menurunnya jumlah penduduk miskin merupakan salah satu tolak ukur dalam suatu keberhasilan pembangunan di suatu negara. Oleh karena itu, dalam suatu proses pembangunan harus mempertimbangkan penurunan tingkat kemiskinan tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang menjadi fokus kinerja di suatu negara.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan besar yang banyak ditemui di setiap negara, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan seperti tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya keterampilan untuk menghasilkan sesuatu untuk dijadikan nilai jual, serta kurangnya peran pemerintah membuat kemiskinan sulit untuk diberantas. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani

kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekeerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak maslaah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara, agar tidak terjadi ketimpangan dalam bidang ekonomi.

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi kurang sejahtera yang dihitung dalam Rp (Rupiah) per kapita per bulan disisi yang lain, Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) sebagai tolak ukur definisi kemiskinan diartikan sebagai kondisi yang kurang diakibatkan kebutuhan hidup seperti makanan, minuman, pakaian, rumah serta kebutuhan pokok lainnya selama satu bulan berdasarkan jumlah kalori, protein, vitamin dan bahan mineral lainnya yang diperlukan untuk hidup layak untuk seorang pekerja. Salah satu cara untuk menangani kemiskinan yaitu dengan adanya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perekonomian di suatu negara yang mengalami peningkatan yang bernilai positif atau menuju ke keadaan yang lebih baik dalam sebuah negara. Untuk memperbaiki perekonomian di suatu negara maka hal yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Selain itu

pemerintah juga harus memperhatikan sumber daya alam yang tersedia untuk dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, Jika kompetensi sumber daya manusianya baik, maka proses pembangunan akan semakin cepat terlaksana. Dengan begitu pembangunan ekonomi akan semakin meningkat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat agar jumlah penduduk miskin tidak semakin bertambah.

Di Indonesia masalah kemiskinan masih menjadi masalah utama yang sedang diusahakan oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan maupun program-program pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Selama masa orde baru, upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dikatakan cukup berhasil. Namun setelah terjadi krisis moneter pada tahun 1998 angka kemiskinan kembali meningkat, sehingga hasil kinerja pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan masih belum maksimal. Ada banyak upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia salah satunya ialah dengan upaya pembangunan nasional.

Jumlah penduduk miskin yang terdapat di suatu negara dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan di negara tersebut. Karena semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin yang terdapat di suatu negara, maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan negara tersebut masih rendah atau dapat dikatakan juga negara tersebut belum sejahtera. Persentase penduduk miskin menurut provinsi-provinsi yang ada di Indonesia tahun 2017-2018. Hal ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin Per Provinsi di Indonesia Tahun 2017 – 2018

Provinsi	2017	2018
Aceh	16.89	15.97
Sumatera Utara	10.22	9.22
Sumatera Barat	6.87	6.65
Riau	7.78	7.39
Jambi	8.19	7.92
Sumatera Selatan	13.19	12.80
Bengkulu	16.45	15.43
Lampung	13.69	13.14
Kep. Bangka Belitung	5.20	5.25
Kep. Riau	6.06	6.20
Dki Jakarta	3.77	3.57
Jawa Barat	8.71	7.45
Jawa Tengah	13.01	11.32
Di Yogyakarta	13.02	12.13
Jawa Timur	11.77	10.98
Banten	5.45	5.24
Bali	4.25	4.01
Nusa Tenggara Barat	16.07	14.75
Nusa Tenggara Timur	21.85	21.35
Kalimantan Barat	7.88	7.77
Kalimantan Tengah	5.37	5.17
Kalimantan Selatan	4.73	4.54
Kalimantan Timur	19	6.03
Kalimantan Utara	7.22	7.09
Sulawesi Utara	8.10	7.80
Sulawesi Tengah	14.14	14.01
Sulawesi Selatan	9.38	9.06
Sulawesi Tenggara	12.81	11.63
Gorontalo	17.65	16.81
Sulawesi Barat	11.30	11.25
Maluku	18.45	18.12
Maluku Utara	6.35	6.64
Papua Barat	25.10	23.01
Papua	27.62	27.74

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 2019

Pada Tabel 1.1 di atas, menunjukkan hasil persentase dari tingginya tingkat kemiskinan di provinsi–provinsi yang ada di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2018, Provinsi Papua memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia. Pada tahun 2018 Persentase penduduk miskin di Provinsi Papua berada pada urutan ke-1, dari 33 Provinsi di Indonesia. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Provinsi Papua yang diikuti dengan Papua Barat, sedangkan Provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah adalah Kalimantan Selatan & Jakarta.

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari kondisi kemiskinan di suatu wilayah semakin sedikit angka kemiskinan di suatu wilayah maka wilayah tersebut mengalami kenaikan kesejahteraan masyarakat, namun sebaliknya jika semakin banyak angka kemiskinan di suatu daerah maka dapat dikatakan wilayah tersebut belum sejahtera. Selain jumlah persentase penduduk miskin yang tinggi, Provinsi Papua juga memiliki tingkat ketimpangan yang cukup tinggi di antara provinsi – provinsi di Indonesia yang ditunjukkan oleh indeks gini sebesar 0,386 (BPS 2019). Berdasarkan data yang telah ditampilkan pada Tabel 1.2 Provinsi Papua menduduki peringkat pertama dengan persentase penduduk miskin paling tinggi jika dibandingkan dengan dengan Provinsi Papua Barat.

Tabel 1.2
Peringkat Tingkat kemiskinan Provinsi di Papua Tahun 2018

Provinsi	Persentase	Peringkat
Papua	27,74	1
Papua Barat	23,01	2

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2019

Tabel 1.2 di atas, menunjukkan peringkat tingkat kemiskinan Provinsi di Papua pada data tahun 2018 tingkat persentase kemiskinan di Provinsi Papua adalah 27,74 persen, sedangkan Papua Barat adalah 23,01 persen. Angka persentase tingkat kemiskinan di Papua yang terdiri dari dua provinsi yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat, memiliki angka tingkat kemiskinan yang sangat tinggi dari provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia, yang mana angka kemiskinan dari Provinsi Papua memiliki peringkat pertama dan peringkat kedua diperoleh pada Provinsi Papua Barat, jika di bandingkan dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini tentu menjadi perhatian atau tugas khusus bagi pemerintah untuk menekan angkat kemiskinan yang ada.

Tingginya tingkat kemiskinan membuat pemerintah Provinsi Papua dihadapkan dengan masalah kemiskinan yang cukup serius, dengan masalah tersebut pemerintah harus memberikan perhatian lebih dalam mengurangi kemiskinan yang ada. Tak hanya itu, Pemerintah juga harus bergerak cepat mengambil kebijakan-kebijakan dan upaya dalam menurunkan jumlah kemiskinan di Provinsi Papua, dengan melihat ataupun meninjau kemabali faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 di berikut ini.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2016-2017
(Ribuan Jiwa)

NO	KABUPATEN / KOTA	2016	2017
1	Kabupaten Merauke	24.28	24.06
2	Kabupaten Jayawijaya	83	81.94
3	Kabupaten Jayapura	16.76	16.31
4	Kabupaten Nabire	36.99	36.68
5	Kabupaten Kepulauan Yapen	25.53	25.35
6	Kabupaten Biak Numfor	38.1	36.63
7	Kabupaten Paniai	65.18	63.38
8	Kabupaten Puncak Jaya	44.27	44.16
9	Kabupaten Mimika	30.12	31.15
10	Kabupaten Boven Digoel	13.38	13.1
11	Kabupaten Mappi	24.82	24.31
12	Kabupaten Asmat	24.97	25.05
13	Kabupaten Yahukimo	74.54	73.27
14	Kabupaten Pegunungan Bintang	22.79	22.41
15	Kabupaten Tolikara	45.33	44.47
16	Kabupaten Sarmi	5.13	5.23
17	Kabupaten Keerom	9.26	9.14
18	Kabupaten Waropen	8.97	9.03
19	Kabupaten Supiori	6.99	7.09
20	Kabupaten Mamberamo Raya	6.42	6.63
21	Kabupaten Nduga	36.72	36.07
22	Kabupaten Lanny Jaya	72.13	69.78
23	Kabupaten Mamberamo Tengah	17.88	17.2
24	Kabupaten Yalimo	21.36	21.18
25	Kabupaten Puncak	40.53	40.17
26	Kabupaten Dogiyai	29.15	28.75
27	Kabupaten Intan Jaya	20.53	20.29
28	Kabupaten Deiyai	32.72	31.33
29	Kota Jayapura	34.48	33.51

Sumber : BPS Provinsi Papua 2019 (Lampiran 1)

Tabel 1.3 di atas, menunjukkan bahwa terdapat banyak perbedaan jumlah penduduk miskin yang begitu jauh dan relatif antara kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Papua. Berdasarkan Tabel 1.3, pada tahun 2017 yang paling besar jumlah penduduk miskinnya adalah Kabupaten Jayawijaya sebanyak 81.94 ribu jiwa, sedangkan wilayah yang jumlah penduduk miskinnya paling rendah yaitu Kabupaten Tambora dengan jumlah sebanyak 5.23 ribu jiwa. Hal ini tentu menjadi perhatian yang khusus bagi pemerintah Provinsi Papua guna mengurangi atau menekan angka kemiskinan maupun ketimpangan antar kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Papua dan juga upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Simatupang, (2003) dalam Saputra (2011), pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh aspek kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi dimana terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional, dan salah satunya dapat dilihat dengan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini.

Tabel 1.4
Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Papua
(Dalam persen)

Kabupaten / Kota	2013	2017
Kabupaten Merauke	8.49	7.46
Kabupaten Jayawijaya	7.31	5.51
Kabupaten Jayapura	10.20	7.01
Kabupaten Nabire	9.27	6.10
Kabupaten Kepulauan Yapen	7.35	4.64
Kabupaten Biak Numfor	7.02	4.57
Kabupaten Paniai	6.96	4.76
Kabupaten Puncak Jaya	4.65	3.73
Kabupaten Mimika	9.48	3.69
Kabupaten Boven Digoel	6.65	4.07
Kabupaten Mappi	5.21	7.03
Kabupaten Asmat	6.14	5.85
Kabupaten Yahukimo	6.76	6.05
Kabupaten Pegunungan Bintang	6.52	6.05
Kabupaten Tolikara	6.15	4.60
Kabupaten Sarmi	6.69	7.10
Kabupaten Keerom	9.59	4.85
Kabupaten Waropen	11.76	7.72
Kabupaten Supiori	4.26	4.01
Kabupaten Mamberamo Raya	9.17	6.45
Kabupaten Nduga	11.26	7.25
Kabupaten Lanny Jaya	8.31	5.39
Kabupaten Mamberamo Tengah	10.89	5.66
Kabupaten Yalimo	12.35	5.19
Kabupaten Puncak	9.19	6.67
Kabupaten Dogiyai	8.11	5.88
Kabupaten Intan Jaya	11.27	3.66
Kabupaten Deiyai	10.90	4.80
Kota jayapura	10.35	6.02

Sumber : BPS Provinsi Papua 2019 (Lampiran 4)

Tabel 1.4 di atas, menunjukkan bahwa adanya perbedaan Pertumbuhan Ekonomi antar daerah yang ada di Provinsi Papua pada tahun 2013 Kabupaten Yalimo memiliki Pertumbuhan Ekonomi tertinggi di Provinsi Papua dan Kabupaten Supiori memiliki Pertumbuhan Ekonomi terendah di Provinsi Papua. Sedangkan, pada tahun 2017 Kabupaten Waropen memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Papua dan kabupaten Intan Jaya memiliki pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Papua. Perbedaan besaran Pertumbuhan Ekonomi merupakan cerminan perbedaan keberhasilan pembangunan daerah atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten / kota yang ada di Provinsi Papua. Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Papua juga merupakan salah satu pulau yang banyak ditemui hasil kekayaan alamnya atau yang biasa dikenal sebagai sumber daya alam, namun disamping hal tersebut pemerintah Provinsi Papua masih dihadapkan dengan masalah tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Terdapat banyak indikator yang mempengaruhi masalah kemiskinan, diantaranya adalah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih tergolong rendah atau mengengang kebawah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, tentu juga menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah (PEMDA) Provinsi Papua dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Papua. Menurut

Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana dan Provinsi Papua mencapai 59.09 persen pada tahun 2017 dengan jumlah penduduk miskin di Papua yang mencapai 897,69 ribu jiwa pada tahun 2017. Berdasarkan tabel 1.5, dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi Papua mengalami trend yang meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Pada tahun 2013, IPM di Provinsi Papua sebesar 56,25 persen dan terus meningkat menjadi 59,09 persen pada tahun 2017.

Tabel 1.5
Persentase IPM di Provinsi Papua 2013-2017

Tahun	Persentase
2013	56,25
2014	56,75
2015	57,25
2016	58,05
2017	59,09

Sumber : BPS Provinsi Papua 2019

Pembangunan dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan perubahan pada indikator sosial maupun ekonomi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan (Mudrajad, 2006 dan Todaro, 2009). Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menjadi salah satu tolak ukur dalam suatu keberhasilan pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari angka pendidikan dan kesehatan, serta juga perekonomian suatu

wilayah atau negara yang semakin membaik. Oleh karena itu, sebagian besar negara baik maju maupun berkembang banyak yang menggunakan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator untuk menilai kualitas sumber daya manusia. Untuk mengatasi kemiskinan pemerintah perlu mengetahui dan melihat faktor–faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap kemiskinan sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Faktor–faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Papua, yakni: Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka penelitian ini menganalisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Papua tahun 2013-2017.
- 2) Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Papua tahun 2013-2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dibuat maka, tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Papua tahun 2013-2017.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Papua tahun 2013-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi:

- 1) Bagi pemerintah daerah khususnya Provinsi Papua dalam menangani tingkat kemiskinan yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Bagi peneliti, untuk memberikan informasi kepada peneliti dan mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi, terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.

1.5 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.
2. Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan mengenai teori – teori yang digunakan sebagai dasar dalam pemecah masalah yang dihadapi, dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menunjukkan hasil penelitian yang telah dianalisis berdasarkan teori untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk peneliti berikutnya.